KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1222/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN INOVASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan analisa SWOT dalam menentukan kebutuhan sistem pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, maka perlu menetapkan Inovasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 12/KMA/SK/II/2007 Tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III Dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV);
8. Keputusan Direktur Jenderai Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara; masukkan SK DJMT Nomor 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024
9. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 962/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026, Tanggal 20 juli 2026

Tentang ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Tentang Penunjukan Tim Uji Kelayakan Inovasi Digitalisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN INOVASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1251/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/X/2025, tanggal 13 Oktober 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1308/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Inovasi Fitur Layanan Permohonan Eksekusi (FLORES);

Kedua : Menetapkan dan Memberlakukan Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai terlampir dalam surat keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 13 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 13/8/26

Acc 13/8/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1222/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VIII/2026
Tanggal : 13 Agustus 2026

SUSUNAN INOVASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA NIP	INOVASI	KETERANGAN
1	NUR FITRIA IDIN, A.Md. NIP. 199204262020122009	Aplikasi Inovasi Fitur Layanan Permohonan Eksekusi (Flores)	Merupakan inovasi layanan berbasis administrasi digital yang berfungsi sebagai sarana pengajuan dan pengelolaan permohonan eksekusi putusan pengadilan. Inovasi ini menyediakan informasi yang jelas mengenai persyaratan, alur, dan tahapan permohonan eksekusi, serta memudahkan pencatatan dan pemantauan permohonan secara tertib.
2	TB. HAFIZH SULTHON ALSHAZMY, S.H. NIP. 200004182024051001	Aplikasi Penggunaan Spreadsheet Kontrol Perkara	Memberikan panduan cara menggunakan spreadsheet kontrol perkara bagi para stake holder yang terkait guna memberikan informasi perkara serta optimalisasi fungsi kontrol perkara.
3	ADE BRIAN BHARTA, S.H. NIP. 199008292025061002	Permohonan Surat Keterangan BHT Secara Elektronik	Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan Pembuatan Surat Keterangan BHT Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar dilaksanakan secara efisien, sistematis dan efektif sesuai dengan standar aplikasi e-Court.
4	DUNAN GINTING, S.T. NIP. 199001232025061003	Sistem Monitoring Sarana/Prasarana (SIMORA)	Sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai PTUN Kupang dalam melaporkan kerusakan sarana dan prasarana agar proses penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terdata lebih baik.
5	I PUTU CHARLES WIARTA YASA, S.H. NIP. 200205162025061001	Pencatatan Peminjaman Dan Pengembalian Berkas Perkara Yang Telah BHT Secara Elektronik	Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam kegiatan Pencatatan Peminjaman dan Pengembalian Berkas Perkara yang telah BHT di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar dilaksanakan secara efisien, sistematis dan efektif sesuai dengan standar aplikasi SIPP.
6	RIO SANJAYA SIRAIT, A.Md. NIP. 200209292025061002	Pengelolaan Buku Bantu Alat Tulis	Buku Bantu Biaya ATK Perkara adalah instrumen pencatatan administrasi keuangan yang

Kantor ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		Kantor (ATK) Perkara	berfungsi untuk merekam seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya Alat Tulis Kantor (ATK) yang digunakan dalam penyelesaian perkara di pengadilan, sehingga memudahkan bendahara ATK dalam melakukan pembukuan, verifikasi stok, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran biaya ATK secara terstruktur dan transparan.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 13/8/26

Acc 13/8/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.